



e-KTP Ditanggung Pemkot
WNA Tetap Bayar

Pamuji Tri Nastiti
 HARIAN JOGJA

JOGJA—Retribusi e-KTP warga Jogja ditanggung pemerintah kota (Pemkot). Sesuai peraturan daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum (RJU), beban biaya pembuatan e-KTP hanya dikenakan kepada warga negara asing (WNA).

Ketua Panitia khusus (Pansus) RJU Bagus Sumbang menyampaikan, meski untuk pembuatan e-KTP biaya yang dibutuhkan nilainya mencapai ratusan ribu, Pemkot Jogja memastikan tidak akan memungut biaya retribusi pembuatan e-KTP warga negara Indonesia (WNI).
 "Sesuai Perda RJU, biaya pembuatan e-KTP untuk WNA ditetapkan sebesar Rp150.000 per orang," katanya, Senin (23/1).

Bagus Sumbang menambahkan, karena pembuatan KTP diwajibkan maka pembuatannya merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja ini menjelaskan pembuatan e-KTP dianggarkan Rp1,07 miliar dari APBD 2012. Dana tersebut disiapkan sejak awal tahun berdasarkan informasi perekaman data e-KTP di Jogja yang hanya dibiayai hingga akhir 2011.

"Informasi yang kita terima masih ditanggung pemerintah hingga April mendatang," ujar politisi Partai Golkar itu.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Nur Affandi membenarkan bahwa pembuatan e-KTP di Kota Jogja hingga April mendatang masih dibiayai Pusat. Kepastian tersebut diperoleh setelah mendatangi Departemen Dalam Negeri di akhir 2011 lalu.

Meski demikian, tambahnya, dana Rp1,07 miliar yang telah dianggarkan dalam APBD tidak serta merta dikembalikan ke kas daerah. Menurutnya dana tersebut masih harus tetap disiapkan untuk pelayanan e-KTP jika di April nanti tidak dapat selesai 100%.

"Target tetap selesai di April nanti. Tetapi dana tetap kami siapkan dan belum dikembalikan ke kas daerah karena belum tahu apa yang akan terjadi setelah April nanti," ungkapnya.

Sementara itu, e-KTP yang saat ini masih dalam proses perekaman data akan mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Seluruh warga akan memiliki KTP baru, dengan masa berlaku selama lima tahun.

Jika pada April nanti seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman data, maka biaya untuk menanggung pembuatan KTP bagi masyarakat baru akan muncul pada 2018 mendatang. □

Dihaturkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005